



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAMBANG SUBAGIYO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 690857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 3255 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 4820 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah Seluas 20000000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
9. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
10. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
11. Tanah Seluas 2363 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
12. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL



SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

212.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOPY MOTOR BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

2. MOBIL, SUZUKI XL7 SEDAN SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

16.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

866.109.280

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

4.569.609.280

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.569.609.280

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.